

## **Analisis Penerapan Metode Zopp Dalam Perencanaan Pembangunan Pendidikan (Studi Kasus RPJPD NTB 2045)**

<sup>1</sup>Rina Tinarty Sihombing, <sup>2</sup>Sudirman, <sup>3</sup>Dadi Setiadi, <sup>4</sup>Asrin,  
<sup>5</sup>Abdul Kadir Jaelani

<sup>1,2</sup>Magister Administrasi Pendidikan. Pascasarjana. Universitas Mataram.  
Email: <sup>1</sup>[rinatinartysihombing@gmail.com](mailto:rinatinartysihombing@gmail.com)

### **Abstrak**

Pembangunan pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan metode *Zielorientierte Projektplanung* (ZOPP) dalam proses perencanaan pembangunan pendidikan jangka panjang yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2025–2045. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Subjek penelitian meliputi staf perencana Bappeda, Dinas Pendidikan, perwakilan sekolah, dan mitra pembangunan yang terlibat dalam penyusunan RPJPD. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, kuesioner terbuka, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan model Miles & Huberman dengan triangulasi, *member check*, dan *audit trail* untuk uji keabsahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan mengikuti regulasi nasional dengan tahapan teknokratik yang dipadukan pendekatan *top-down* dan imperatif. Penerapan elemen ZOPP tampak pada analisis masalah, kerangka logis, dan rencana operasional yang dilakukan secara parsial serta melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor. Faktor pendukung mencakup dukungan regulasi, keterlibatan multi-aktor, dan dukungan anggaran dari mitra pembangunan, sedangkan kendala utama adalah keterbatasan anggaran untuk implementasi, pengaruh politik, dan kapasitas teknis SDM. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas perencana dan mekanisme pengawalan agar proses perencanaan pendidikan dapat berjalan lebih efektif.

**Kata Kunci:** *Metode ZOPP, Perencanaan pembangunan pendidikan, RPJPD NTB 2025–2045, perencanaan teknokratik*

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan pendidikan merupakan pilar utama dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia yang selanjutnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional. Proses perencanaan pendidikan yang efektif, mencakup aspek jangka pendek, menengah, dan panjang, menjadi instrumen kunci bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam mewujudkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pemerataan kualitas pendidikan. Keberhasilan suatu negara dalam pembangunan pendidikan akan menjadi fondasi penting bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat serta kemajuan peradaban.

Di Indonesia, pelaksanaan perencanaan pendidikan daerah sering kali kurang komprehensif dan belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan nasional. Dalam konteks Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), proses perencanaan kerap dipengaruhi oleh *political will* lokal dan cenderung reaktif, tanpa mempertimbangkan dinamika jangka panjang yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global maupun regional (Kurniawan, 2021). Ketidaksinkronan ini berdampak pada ketidakselarasan antara tujuan pendidikan dan kebutuhan pembangunan daerah, sehingga perencanaan pendidikan belum mampu menjawab tantangan masa depan secara efektif.

Data Badan Pusat Statistik NTB periode 2019 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan IPM dari 68,14 menjadi 72,37, namun capaian ini masih berada di bawah rata-rata nasional yang pada periode yang sama meningkat dari 71,92 menjadi 74,39. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan signifikan dalam kualitas dan akses pendidikan yang belum teratasi secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan, tantangan dalam pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di NTB masih memerlukan perhatian serius dalam perencanaan jangka panjang.

Evaluasi terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) NTB 2022–2025 menyimpulkan bahwa rata-rata lama sekolah Provinsi NTB (7,61 tahun) dan angka buta huruf (11,03%) masih jauh dari target nasional yang menetapkan rata-rata lama sekolah 8,77 tahun dan angka buta huruf 0%. Tantangan utama dalam pembangunan pendidikan di NTB terletak pada keterbatasan akses dan kualitas pembelajaran yang belum merata. Permasalahan ini menuntut adanya kebijakan strategis yang lebih terarah, berbasis data, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Sanisah (2023) menegaskan bahwa indeks relevansi antara anggaran pendidikan dan perencanaan di Kabupaten Lombok Tengah hanya mencapai 0,35%, yang mencerminkan minimnya sinergi antara anggaran program pendidikan dengan perencanaan strategis yang terintegrasi dan berorientasi pada prinsip *good governance*. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun dokumen perencanaan telah disusun, realisasi anggaran kerap tidak selaras dengan program prioritas

sehingga berimplikasi pada rendahnya efektivitas pembangunan pendidikan daerah. Hal ini juga menyoroti perlunya mekanisme pengawasan dan koordinasi yang lebih baik dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Pada tahun 2024, melalui Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, pemerintah melakukan penyelarasan RPJPN 2025–2045 dengan RPJPD 2025–2045. Langkah ini menjadi krusial untuk memastikan pembangunan daerah, termasuk sektor pendidikan, selaras dengan visi pembangunan nasional jangka panjang. Namun, meskipun kerangka perencanaan telah diselaraskan, fleksibilitas tetap diperlukan agar perencanaan daerah dapat merespons perubahan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan lokal secara tepat waktu dan efektif.

Upaya penyusunan dokumen RPJPD NTB dilakukan oleh Bappeda melalui kolaborasi intensif dengan pemangku kepentingan pendidikan. Proses ini melibatkan diskusi mendalam untuk mengidentifikasi permasalahan, potensi, rencana program, serta rumusan indikator pembangunan jangka panjang. Keterlibatan berbagai aktor dalam proses perencanaan diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun demikian, tantangan muncul dari perbedaan pendekatan teknokratik yang berbasis data dan analisis ahli dengan kemungkinan pergeseran visi misi kepala daerah terpilih yang cenderung bersifat politis.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, dibutuhkan metode perencanaan yang tidak hanya sistematis dan berbasis data, tetapi juga partisipatif dan adaptif. Salah satu pendekatan yang relevan adalah metode *Zielorientierte Projektplanung* (ZOPP) atau perencanaan berorientasi sasaran. ZOPP dirancang secara bertahap melalui analisis masalah, analisis pemangku kepentingan, identifikasi alternatif strategi, serta penyusunan matriks perencanaan proyek. Keunggulan metode ini terletak pada kemampuannya melibatkan pemangku kepentingan secara aktif melalui forum diskusi dan workshop sehingga menghasilkan perencanaan yang lebih inklusif, transparan, dan kontekstual (Feliciano, 2018).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa metode ZOPP mampu menghubungkan perencanaan strategis dengan implementasi program melalui

komunikasi yang lebih efektif serta penciptaan konsensus di antara pemangku kepentingan. Namun demikian, penerapan metode ini juga memerlukan pengelolaan yang hati-hati agar tidak terjebak pada proses yang terlalu mekanistik dan mengabaikan dinamika kelompok. Dalam konteks NTB, penerapan ZOPP diharapkan dapat menjawab permasalahan kesenjangan perencanaan dan pelaksanaan, serta memperkuat relevansi antara program pendidikan dan kebutuhan masyarakat lokal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan metode ZOPP dalam perencanaan pembangunan pendidikan jangka panjang di NTB, khususnya dalam penyusunan RPJPD 2025–2045 yang selaras dengan RPJPN 2025–2045. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan perencanaan pendidikan yang bersifat sistematis, partisipatif, dan berwawasan masa depan. Hasilnya diharapkan mampu memperkuat sinergi antara kebijakan daerah dan nasional dalam mencapai tujuan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang kompleks, khususnya mengenai penerapan metode ZOPP dalam perencanaan pembangunan pendidikan jangka panjang di Provinsi NTB. Sejalan dengan pandangan Creswell (2018), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna yang dikonstruksi individu atau kelompok terhadap suatu fenomena dan memahami proses serta dinamika yang terjadi secara kontekstual. Studi kasus digunakan karena fokus penelitian adalah menganalisis penerapan metode ZOPP pada penyusunan dokumen RPJPD NTB 2025–2045 yang memiliki karakteristik unik dan spesifik.

Subjek penelitian meliputi staf perencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, staf perencana Dinas Pendidikan Provinsi NTB, perwakilan sekolah, serta mitra pembangunan yang terlibat dalam penyusunan dokumen RPJPD sektor pendidikan. Penentuan informan dilakukan

menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan berdasarkan keterlibatan langsung dan pemahaman mereka terhadap proses perencanaan dan penggunaan metode ZOPP. Teknik ini sesuai dengan pandangan Sugiyono (2022) yang menyebutkan bahwa *purposive sampling* efektif digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh data yang mendalam dan relevan.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan pendidikan dalam dokumen RPJPD Provinsi NTB 2025–2045 dilaksanakan mengikuti regulasi nasional. Regulasi ini memberikan kerangka formal berupa tahapan persiapan, penyusunan, hingga penetapan dokumen melalui Peraturan Daerah. Kondisi ini sejalan dengan pandangan bahwa regulasi perencanaan jangka panjang menjadi acuan utama dalam menjamin sinkronisasi pusat dan daerah (Putri, 2023). Realitas di NTB memperlihatkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi memberikan struktur perencanaan yang sistematis meskipun substansi rencana tetap disesuaikan dengan konteks lokal.

Peran Bappeda Provinsi NTB terlihat dominan sebagai koordinator utama penyusunan dokumen RPJPD. Bappeda mengarahkan proses teknis, mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan memastikan sinkronisasi antar sektor. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan memberikan masukan teknis terkait isu pendidikan, termasuk data dan analisis kebutuhan. Temuan ini menguatkan argumen bahwa koordinasi antarinstansi merupakan faktor kunci keberhasilan perencanaan daerah (Raharjo, 2022). Dalam konteks NTB, sinergi Bappeda dan Dinas Pendidikan mempermudah integrasi isu pendidikan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang.

Meskipun tahapan perencanaan telah baku sesuai regulasi, substansi dokumen RPJPD disusun berdasarkan analisis kebutuhan lokal yang dilakukan pemerintah daerah. Pendekatan ini sejalan dengan temuan yang menekankan bahwa perencanaan berbasis konteks daerah lebih adaptif terhadap masalah spesifik wilayah dibandingkan rencana yang seragam secara nasional (Abdullah, 2022). Pada kasus NTB, integrasi data lokal seperti capaian Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) dan rata-rata lama sekolah menjadi dasar penyusunan sasaran pendidikan jangka panjang.

Karakteristik perencanaan pendidikan di NTB mengalami transformasi yang progresif seiring dinamika kebijakan pusat dan kebutuhan lokal. Pada tahap awal, pola perencanaan didominasi pendekatan teknokratik yang bersifat top-down. Namun, dalam penyusunan RPJPD 2025–2045 pola tersebut bergeser menjadi kombinasi antara pendekatan teknokratik, top-down, dan imperatif. Pergeseran model ini mencerminkan kecenderungan nasional menuju *hybrid planning*, yaitu model perencanaan yang mengintegrasikan arahan pusat dengan penyesuaian konteks daerah, sembari tetap mempertahankan pengaruh politik pimpinan daerah (Hidayat, 2021). Realitas ini tampak dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang kini lebih interaktif dan responsif dibanding periode sebelumnya.

Pelibatan pemangku kepentingan menjadi salah satu ciri krusial dalam proses perencanaan RPJPD NTB. Stakeholders yang terlibat mencakup OPD lintas sektor, LSM/NGO, akademisi, dan perwakilan masyarakat. Pendekatan partisipatif ini sejalan dengan gagasan yang menekankan pentingnya kolaborasi multi-aktor dalam menghasilkan kebijakan yang inklusif (Afandi dkk., 2022). Praktik di NTB menunjukkan bahwa konsultasi publik dan diskusi mendalam dilakukan pada tahap penyusunan rancangan awal hingga musrenbang, walaupun skala keterlibatannya masih dibatasi oleh ketersediaan anggaran.

Penerapan metode ZOPP terlihat melalui penggunaan analisis masalah, penyusunan kerangka logis, dan rencana operasional. Meskipun terminologi ZOPP tidak digunakan secara eksplisit, prinsip-prinsipnya seperti peta masalah dan matriks kerangka logis telah diintegrasikan ke dalam proses perencanaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa elemen ZOPP dapat diimplementasikan pada perencanaan daerah meskipun tanpa label formal (Abdullah, 2022). Realitasnya, penggunaan alat bantu seperti kertas kerja logis membantu mempermudah identifikasi tujuan dan strategi program pendidikan di NTB.

Dukungan regulasi menjadi faktor utama yang memperkuat penerapan ZOPP di NTB. Regulasi nasional mendorong perencanaan berbasis analisis teknokratik dan memberikan ruang untuk partisipasi pemangku kepentingan. Kerangka hukum yang jelas meningkatkan legitimasi rencana pembangunan sekaligus meminimalkan konflik kepentingan antaraktor (Kurniawan, 2021). Di NTB, dukungan ini semakin menguat dengan adanya instruksi penyelarasan RPJPD dan RPJPN yang memastikan visi daerah sejalan dengan visi nasional Indonesia Emas 2045.

Selain regulasi, keterlibatan beragam aktor lintas sektor juga menjadi faktor pendukung penting. Kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan NGO memperkaya perspektif perencanaan dan memperkuat keakuratan data. Keterlibatan lintas aktor dapat menghasilkan perencanaan yang lebih inovatif karena setiap pihak membawa pengetahuan dan sumber daya yang berbeda (Afandi dkk., 2022). Dalam konteks NTB, keterlibatan NGO dalam memfasilitasi diskusi teknis membantu meningkatkan kualitas rumusan sasaran pendidikan jangka panjang.

Dukungan anggaran dan bantuan teknis juga menjadi pendorong penerapan ZOPP. Adanya dukungan alokasi anggaran dari mitra Pembangunan untuk forum diskusi, konsultasi publik, dan analisis data memungkinkan pelaksanaan tahapan perencanaan yang lebih terstruktur. Keberhasilan perencanaan tidak hanya bergantung pada konsep, tetapi juga pada kecukupan anggaran untuk pelaksanaan tahapan partisipatif (Sanisah, 2023). Namun, realita di NTB menunjukkan bahwa adanya keterbatasan anggaran ketika proses perencanaan membutuhkan pelibatan pemangku kepentingan yang lebih luas.

Kendala utama dalam penerapan metode ZOPP adalah keterbatasan anggaran yang membatasi keberlanjutan proses perencanaan yang partisipatif dan juga implementasi perencanaan. Forum diskusi yang idealnya melibatkan lebih banyak pihak harus disesuaikan dengan ketersediaan dana. Temuan ini sejalan dengan hasil studi yang menyatakan bahwa salah satu hambatan terbesar perencanaan partisipatif adalah pembiayaan yang minim, terutama di daerah dengan kapasitas fiskal rendah seperti NTB (Hidayat, 2021). Kondisi ini berdampak

pada representasi stakeholder yang tidak sepenuhnya merata dalam proses perencanaan.

Pengaruh politis juga menjadi kendala yang cukup menonjol dan memengaruhi kualitas hasil perencanaan. Intervensi politik terkadang mengubah prioritas program dan menyebabkan hasil analisis teknokratik tidak sepenuhnya diadopsi. Hal ini senada dengan temuan yang menunjukkan bahwa *political will* kepala daerah sering kali menentukan arah kebijakan meskipun tidak selalu sejalan dengan rekomendasi teknis (Putri, 2023). Pada kasus NTB, tarik menarik antara visi teknokratik RPJPD dan visi politik anggota legislatif terpilih menjadi tantangan yang perlu diantisipasi sejak awal penyusunan.

Kapasitas teknis sumber daya manusia (SDM) perencana juga bervariasi, yang memengaruhi kualitas analisis masalah dan penyusunan kerangka logis. Beberapa staf memiliki kemampuan analitis yang memadai, sementara lainnya masih terbatas dalam mengolah data dan memimpin diskusi. Kualitas SDM sangat menentukan kedalaman perencanaan serta efektivitas penggunaan alat seperti ZOPP (Raharjo, 2022). Kondisi di NTB menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas melalui pelatihan teknis dan pendampingan berkelanjutan agar proses perencanaan lebih komprehensif.

Secara keseluruhan, model perencanaan pendidikan dalam RPJPD NTB 2025–2045 telah mengadopsi prinsip-prinsip ZOPP meskipun belum sepenuhnya optimal. Pendekatan teknokratik dipadukan dengan *top-down* dan imperatif, serta pelibatan multi-aktor yang lebih beragam dibanding periode sebelumnya. Hal ini sejalan dengan temuan yang menyatakan bahwa perencanaan daerah cenderung bergerak ke arah hybrid planning untuk menyeimbangkan kebutuhan lokal dan tuntutan nasional (Abdullah, 2022).

Namun, realita menunjukkan bahwa tantangan masih cukup kompleks, terutama terkait harmonisasi pusat-daerah, pengaruh politik, dan keterbatasan kapasitas SDM. Kondisi ini membutuhkan mekanisme pengawalan yang lebih kokoh agar hasil perencanaan tidak hanya normatif di atas kertas tetapi juga implementatif. Diperlukan sistem monitoring berkelanjutan untuk

memastikan rencana yang partisipatif dapat diwujudkan dalam kebijakan nyata (Afandi dkk., 2022).

Dengan demikian, meskipun penerapan metode ZOPP dalam perencanaan pembangunan pendidikan di NTB telah menunjukkan perkembangan positif, perbaikan ke depan perlu difokuskan pada penguatan kapasitas teknis, perluasan pelibatan stakeholder, serta peningkatan mekanisme pengawasan dan pembiayaan. Langkah ini penting agar RPJPD NTB 2025–2045 benar-benar menjadi dokumen strategis yang mampu menjawab tantangan pendidikan jangka panjang di NTB.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses perencanaan pembangunan pendidikan dalam dokumen RPJPD Provinsi NTB 2025–2045 dilaksanakan mengikuti kerangka regulasi nasional yang mengatur tahapan persiapan, penyusunan, hingga penetapan dokumen melalui Peraturan Daerah, dengan Bappeda Provinsi NTB berperan dominan sebagai koordinator dan Dinas Pendidikan sebagai penyedia masukan teknis berbasis konteks lokal. Penerapan metode ZOPP tercermin melalui penggunaan analisis masalah, kerangka logis, dan rencana operasional secara parsial meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam terminologi perencanaan, serta melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor melalui musrenbang dan konsultasi publik yang mendorong pergeseran dari model teknokratik murni ke arah *hybrid planning* yang mengintegrasikan pendekatan teknokratik, top-down, dan imperatif. Faktor pendukung utama meliputi dukungan regulasi nasional, keterlibatan multi-aktor, dan dukungan mitra pembangunan, sementara kendala yang dihadapi mencakup keterbatasan anggaran untuk keberlanjutan serta implementasi perencanaan, pengaruh politik dalam penentuan prioritas kebijakan, dan variasi kapasitas teknis sumber daya manusia perencana. Secara keseluruhan, perencanaan pendidikan jangka panjang NTB telah bergerak menuju pola yang lebih inklusif dan terstruktur, namun optimalisasi ke depan memerlukan penguatan kapasitas teknis, mekanisme partisipasi yang lebih luas, serta sistem pengawalan implementasi yang berkelanjutan agar dokumen RPJPD tidak hanya bersifat normatif tetapi juga implementatif dalam menjawab tantangan pendidikan jangka panjang di NTB.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, M. (2022). *Penerapan metode ZOPP dalam perencanaan pembangunan partisipatif daerah*. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Daerah*, 18(2), 145–160.
- Abdullah, R. (2022). Perencanaan partisipatif dan integrasi kebijakan pusat-daerah dalam pembangunan pendidikan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 18(2), 115–128.
- Afandi, M., Wijaya, T. T., & Nuraini, L. (2022). Kolaborasi multi-aktor dalam perencanaan pembangunan daerah: Studi pada sektor pendidikan. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan*, 14(1), 33–47.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia 2019–2023*. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (2019). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. New York: Routledge.
- Feliciano, M. (2018). Participatory planning and the ZOPP method: Contributions to inclusive project management. *Saúde em Debate*, 42(117), 392–407.
- Hidayat, A. (2021). Hybrid planning: Model perencanaan pembangunan daerah berbasis teknokratik dan politik. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 27(3), 201–214.
- Hidayat, A. (2021). Partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah berbasis kolaborasi. *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi Negara*, 6(3), 201–215.
- Kurniawan, A. (2021). Tantangan perencanaan pendidikan jangka panjang di Indonesia: Analisis kebijakan reaktif dan implikasinya. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Nasional*, 10(2), 45–58.
- Kurniawan, D. (2021). Dinamika political will dalam perencanaan pendidikan jangka panjang. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 9(2), 77–89.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2019). *Naturalistic inquiry*. Beverly Hills: SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

- Putri, A. (2023). Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah dalam penyusunan RPJPD pendidikan. *Jurnal Manajemen Publik*, 12(4), 251–266.
- Putri, S. (2023). Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah dalam pembangunan pendidikan: Tantangan dan peluang. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 11(1), 33–47.
- Raharjo, B. (2022). Kapasitas sumber daya manusia perencana dan implikasinya pada kualitas kebijakan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 16(2), 145–159.
- Raharjo, S. (2022). Kapasitas sumber daya manusia dan kualitas data dalam perencanaan pembangunan daerah. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 9(2), 87–102.
- Sanisah, N. (2015). Permasalahan implementasi kebijakan anggaran pendidikan di NTB: Studi kasus Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan Daerah*, 7(2), 33–41.
- Sanisah, N. (2023). Keterkaitan pembiayaan dan perencanaan pendidikan di daerah: Studi kasus Lombok Tengah. *Jurnal Ekonomi Pendidikan*, 11(1), 41–55.
- Sanisah, N. (2023). Relevansi anggaran pendidikan dan perencanaan di Kabupaten Lombok Tengah: Studi evaluasi kebijakan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pendidikan*, 15(1), 12–25.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Bappenas. (2024). *Penyelarasan RPJPN 2025–2045 dan RPJPD 2025–2045*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.